



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**PILIHAN STRATEGI INDONESIA DALAM SENGKETA PERBATASAN :
ANALISIS *GAME THEORY* MENGHADAPI SENGKETA AMBALAT**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam Bidang Pertahanan**

**BUDI WIBOWO
1 2010 02 02 002**

**SEKOLAH KAJIAN PERTAHANAN DAN STRATEGI
PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN**

**JAKARTA
APRIL 2012**

ABSTRAK

Nama : Budi Wibowo
Program : Ekonomi Pertahanan
Judul : PILIHAN STRATEGI INDONESIA DALAM SENGKETA PERBATASAN
Analisis *Game Theory* Menghadapi Konflik Ambalat

Sengketa wilayah merupakan salah satu dinamika dalam hubungan antar negara. Konflik Ambalat merupakan salah satu sengketa wilayah yang saat ini terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Tesis ini mencoba menganalisa konflik dan perilaku pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik dan kemungkinan *payoff* yang diperoleh oleh setiap negara dengan menggunakan salah satu alat analisa ekonomi yaitu *hawk-dove game theory model*. Komparasi *national power* juga akan digunakan untuk mengetahui strategi apa yang dapat dipilih dalam *game theory*. Dengan asumsi bahwa setiap pemain akan bersikap rasional, analisa terhadap konflik dilakukan dalam dua sifat permainan yaitu *purely conflict* dan *mix-motive*. Berdasarkan permainan yang bersifat *purely conflict* tesis ini menganalisa konflik Ambalat sebagai permainan yang murni kompetitif. Sedangkan berdasarkan permainan yang bersifat *mix-motive*, tesis ini menganalisa pengaruh aliansi (FPDA) dan faktor-faktor lain dalam ekuilibrium konflik Ambalat.

Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini merupakan metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Metode deskriptif analitis dipakai untuk membandingkan aspek *national power* kedua negara. Metode kuantitatif deterministik dalam *game theory* digunakan untuk menganalisa konflik Ambalat dan perilaku negara yang terlibat didalamnya.

Kata kunci:

Ambalat, konflik, *national power*, *game theory*, *hawk-dove game*, *payoff*, *mix-motive*, ekuilibrium.

ABSTRACT

Name : Budi Wibowo
Program : Defense Economy
Title : Indonesia's Strategy options towards Territorial Dispute
A Game Theory Analysis on Ambalat

Territorial dispute is one of the many dynamics of international relationship, and the conflict of Ambalat is one of territorial disputes between Indonesia and Malaysia. Using a *hawk-dove game* as its *game theory model* as one of economic analysis tools, this thesis tries to analyze the conflict and the behavior of those involved in the dispute, as well as the payoff that could possibly be gained by both countries. The national powers of both countries will be compared in order to find the best strategy chosen in the game theory. The analysis on the conflict will be based on two natures of the game namely the *purely conflict* and the *mix-motive*, with the assumption that both players are conducting rational behavior. Based on the *purely conflict* nature of the game, this thesis tries to analyze the conflict of Ambalat as a purely competitive game. Meanwhile based on the *mix-motive* nature of the game, this thesis tries to analyze how the FPDA and other factors might influence the conflict's equilibrium.

This thesis is using both *quantitative* and *qualitative* methodologies for its analysis. *Analytical descriptive* methodology is applied to compare the national power of both countries. *Deterministic quantitative* methodology in a game theory is applied to analyze the conflict and behavior of both countries.

Key words:

Ambalat, conflict, national power, game theory, hawk-dove game, payoff, mix-motive, equilibrium

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xv
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Asumsi dan Batasan Penelitian	13
1.6 Desain Penelitian	15
1.7 Sistematika Penelitian	16
2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	17
2.1 Ekonomi Pertahanan.....	17
2.2 Kebijakan dan Strategi Pertahanan Malaysia	18
2.2.1 Intensi Malaysia dalam Konflik Ambalat	19
2.3 Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia	21
2.3.1. Konsepsi Ancaman	22
2.3.2. Intensi Indonesia dalam Konflik Ambalat	24
2.4 <i>Game Theory</i>	26
2.4.1 <i>Brinkmanship</i> dan <i>Hawk-Dove games</i>	27
2.5 Diplomasi dan Kepentingan Nasional	32
2.6 <i>National Power</i>	34
2.6.1. Pengukuran <i>National Power</i>	36
2.6.2. Composite Index of National Capabilities	39
2.7 Kerangka Pemikiran	42
3. METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1 Metode Penelitian	45
3.2 Unit Analisa dan Pengumpulan Data	46
3.2.1 Unit Analisa	46
3.2.2. Pengumpulan Data	47
3.2.2.1 Studi Pustaka	47
3.2.2.2 Pengumpulan Data Tertutup	48
3.2.2.3 Wawancara	48
3.2.3 Sumber Data	49
3.3 Validitas Isi	50

3.4	Validitas Internal	50
3.5	Validitas Eksternal	51
3.6	Desain Penelitian	52
4.	ANALISA KOMPARASI KEKUATAN NASIONAL	55
4.1	Aspek Komparatif dalam <i>National Power</i>	55
4.2	Lingkup Analisis dan Batasan Waktu	57
4.3.	<i>Resources</i>	58
4.3.1	Perbandingan Aspek Geografi	58
4.3.2	Demografi	62
4.3.2.1	Demografi Malaysia	62
4.3.2.1	Demografi Indonesia	63
4.3.2.3	Perbandingan Aspek Demografi	65
4.3.3	Energi dan Mineral	66
4.3.3.1	Energi dan Mineral Malaysia	67
4.3.3.2	Energi dan Mineral Indonesia	68
4.3.3.3	Perbandingan Aspek Energi	69
4.3.4	Agrikultur dan Tanaman Pangan	72
4.3.4.1	Agrikultur Malaysia	73
4.3.4.2	Agrikultur Indonesia	73
4.3.4.3	Perbandingan Agrikultur dan Pangan	74
4.4	Kekuatan Militer	76
4.4.1	Belanja Militer, Jumlah Personil dan Organisasi	77
4.4.2	Alutsista dan Industri Pertahanan	80
4.4.2.1	Alutsista Darat	80
4.4.2.2	Alutsista Laut	83
4.4.2.3	Alutsista Udara	85
4.4.2.4	Industri Pertahanan	89
4.4.3	Analisa Perbandingan Kekuatan Militer	93
4.5	Ekonomi dan Finansial	96
4.5.1	Ekonomi dan Finansial Malaysia	96
4.5.2	Ekonomi dan Finansial Indonesia	98
4.5.3	Analisa Perbandingan Kekuatan Ekonomi	100
4.6	Politik dan Pemerintahan	106
4.6.1	Politik dan Pemerintahan Malaysia	106
4.6.1.1	Partai Politik	106
4.6.2	Politik dan Pemerintahan Indonesia	108
4.6.2.1	Partai Politik di Indonesia	109
4.6.3	Perbandingan Sistim Politik dan Pemerintahan	111
4.7	Diplomasi dan Politik Luar Negeri	116
4.7.1	Malaysia	116
4.7.1.1	Kerjasama Bilateral	116
4.7.1.2	Kerjasama Multilateral dan Aliansi	117
4.7.2	Indonesia	118
4.7.2.1	Kerjasama Bilateral	118
4.7.2.2	Kerjasama Multilateral	119
4.7.3	Analisa Perbandingan Kekuatan Diplomasi	120
4.8	Komparasi kekuatan Nasional	121

5.	ANALISA GAME THEORY PADA KONFLIK AMBALAT	124
5.1	<i>Defining The Game</i>	124
5.1.1	<i>Standpoint</i> Indonesia	124
5.1.2	<i>Standpoint</i> Malaysia	126
5.1.3	Indikasi Faktual	127
5.1.4	Pilihan Strategi dalam Sengketa	130
5.1.5	<i>Value-Cost</i> Dalam Sengketa	132
5.1.6	Konflik Ambalat : <i>Constant-sum game</i>	133
5.2	Pilihan Strategi dalam Konflik Ambalat	133
5.2.1	Interpretasi Ranking Prioritas Indonesia - Malaysia	136
5.3	<i>Ordinal Payoff</i>	139
5.3.1	<i>Security Level</i>	141
5.3.2	Prudensial <i>Security Level</i> Indonesia	141
5.3.3	Prudensial <i>Security Level</i> Malaysia	142
5.4	Ekuilibrium Ordinal	143
5.5	Permainan dengan <i>Payoff</i> Kardinal	145
5.6	Permainan dengan <i>Sequential Moves</i>	152
5.7	Peranan Aliansi FPDA dalam Ekuilibrium	153
5.8	Realita Perspektif Konflik : <i>Mix-Motive Games</i>	158
5.8.1	Nilai Permainan dalam <i>Mix-Motive Games</i>	163
5.8.2	Nilai <i>Payoff</i> Rata-Rata	168
6	KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1	Kesimpulan.....	171
6.2	Saran.....	172
6.2.1	Saran Konseptual.....	172
6.2.2	Saran Praktis.....	173
	Daftar Referensi.....	175

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Ekspor-Impor dengan Malaysia....	4
Tabel 1.2	Cadangan Energi dan Ancaman Asing	14
Tabel 2.1	Proyeksi Ancaman Sampai Tahun 2029	23
Tabel 4.1	Perbandingan Aspek Geografi	61
Tabel 4.2	Perbandingan Aspek Demografi	65
Tabel 4.3	Perbandingan Aspek Energi dan Mineral	70
Tabel 4.4	Perbandingan Komoditas Pangan	75
Tabel 4.5	Perbandingan Anggaran, <i>Manpower</i> dan Organisasi	78
Tabel 4.6	Perbandingan Alutsista Darat	82
Tabel 4.7	Perbandingan Alutsista Laut	84
Tabel 4.8	Perbandingan Kekuatan Udara	88
Tabel 4.9	Perbandingan Kekuatan Ekonomi	100
Tabel 4.10	Perbandingan Politik dan Pemerintahan	109
Tabel 4.11	Democracy Index	112
Tabel 4.12	Agregat Governance Index	114
Tabel 4.13	Human Development Index	114
Tabel 4.14	Perbandingan kekuatan Diplomasi	120
Tabel 4.15	Komparasi National Power.	122
Tabel 5.1	Opsi Indonesia	137
Tabel 5.2	Opsi Malaysia	138
Tabel 5.3	Opsi Indonesia dalam Nilai Kardinal	147
Tabel 5.4	Opsi Malaysia dalam Nilai Kardinal.	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Ambalat	7
Gambar 1.2	Peta Ambalat	8
Gambar 1.3	Desain Penelitian	15
Gambar 2.1	Matrik Payoff Tradisional <i>Hawk-Dove Games</i>	28
Gambar 2.2	Model Ancaman Krisis Kuba	30
Gambar 2.3	Visualisasi Interaksi Indonesia-Malaysia	31
Gambar 2.4	Skema Kepentingan Nasional	33
Gambar 2.5	Kerangka Pemikiran	43
Gambar 3.1	Desain Penelitian	53
Gambar 4.1	Peta Lokasi Malaysia dan Asia	58
Gambar 4.2	Peta Lokasi Indonesia dan Asia	59
Gambar 4.3	Peta Daerah Rawan Bencana dan Tsunami	59
Gambar 4.4	Grafik <i>Response Time</i> dan Luas Wilayah	60
Gambar 4.5	Proyeksi <i>Energy-Mix</i> Malaysia	71
Gambar 4.6	Proyeksi <i>Energy-Mix</i> Indonesia	71
Gambar 4.7	Grafik Tren Anggaran Pertahanan	93
Gambar 4.8	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Malaysia	102
Gambar 4.9	Komposisi PDB Menurut Sektor	103
Gambar 4.10	Komposisi PDB menurut Aktivitas	103
Gambar 5.1	Peta Delimitasi Batas Ambalat	128
Gambar 5.2	Matriks Payoff Tradisional	132
Gambar 5.3	Kombinasi Strategi dua Negara	134
Gambar 5.4	Visualisasi Interaksi Negara	135
Gambar 5.5	Kombinasi Payoff dengan $V > C > 0$	137
Gambar 5.6	Matrik Payoff Ordinal Ind vs Malaysia	140
Gambar 5.7	Indonesia Security Level	142
Gambar 5.8	Malaysia Security Level	143
Gambar 5.9	Ekuilibrum Ind vs Malaysia	144
Gambar 5.10	Payoff Kardinal Ind vs Malaysia	147
Gambar 5.11	Bentuk ekstensif Indonesia vs Malaysia	148

Gambar 5.12 Bentuk ekstensif Malaysia vs Indonesia	149
Gambar 5.13 Grafik <i>Payoff</i> Poligon	149
Gambar 5.14 <i>Payoff</i> Poligon dengan Parreto Optimal	151
Gambar 5.15 Sequential Game	153
Gambar 5.16 Model Aliansi	155
Gambar 5.17 Matrik <i>payoff</i> dengan Aliansi	156
Gambar 5.18 Matrik <i>Payoff</i> Games of Chicken	157
Gambar 5.19 Eliminasi Strategi Dominan	162
Gambar 5.20 Matrik <i>payoff</i> dengan probabilitas	164
Gambar 5.21 Matrik <i>Payoff</i> untuk <i>general mixture</i>	166
Gambar 5.22 Response Diagram Indonesia	166
Gambar 5.23 Response Diagram Malaysia	167
Gambar 5.24 <i>Payoff</i> Poligon dan Nilai Rata-Rata	169

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Dalam konteks hubungan internasional, permasalahan mengenai batas kedaulatan wilayah antar negara seringkali menimbulkan sengketa. Berdasarkan data dari *Internasional Boundary Study, US Departement of State*, saat ini terdapat kurang lebih 232 sengketa wilayah antar negara-negara di seluruh dunia termasuk di wilayah Antartika. Proses penyelesaian sengketa perbatasan antar negara dapat dilakukan melalui : 1) pendekatan politik (diplomasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi dan *stalemate*) ; 2) pendekatan hukum (ajudikasi melalui Mahkamah Internasional) dan; 3) pendekatan dengan menggunakan kekerasan/perang (Yusuf,2011).

Sebagian besar sengketa wilayah antar negara dapat diselesaikan melalui pendekatan politik dan hukum. Pendekatan politik akan menghasilkan perjanjian/kesepakatan antara negara-negara yang bersengketa. Pendekatan hukum akan menghasilkan keputusan *International Court of Justice* (ICJ) yang bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak yang bersengketa. Pendekatan dengan kekerasan akan menghasilkan kondisi eliminasi yaitu pihak yang lemah akan mundur, serta dominasi yaitu pihak yang kuat akan dapat memaksakan kehendaknya (Mauna,2008). Pendekatan dengan kekerasan juga dapat menghasilkan kondisi yang *stalemate* yaitu pihak-pihak yang bersengketa menghentikan perang karena memiliki kekuatan yang sama dan mengalami perang yang berkepanjangan (Yusuf,2011).

Dalam konteks wilayah regional Asia Tenggara dan Asia Pasifik, potensi konflik karena sengketa wilayah antar negara cukup tinggi. Sengketa wilayah di Laut China Selatan antara 9 negara ASEAN dan China memiliki potensi untuk terjadinya eskalasi konflik bersenjata. Konflik senjata akibat sengketa perbatasan teraktual adalah yang terjadi antara Thailand dan

Kamboja. Konflik ini terjadi sejak tahun 2008 akibat adanya sengketa terhadap Kuil Preah Vihear yang terletak di antara distrik Kantharalak di provinsi Sisaket dan distrik Choam Khsant di provinsi Preah Vihear. Thailand mengklaim demarkasi belum selesai untuk wilayah luar kuil. Saat ini, kekuatan militer kedua belah pihak saling berhadapan dalam kondisi siaga perang di seberang perbatasan masing-masing di sekitar candi Preah, yang terletak di antara provinsi Si Sa Khet dan Preah Vihear, sekitar 400 kilometer di timur laut Bangkok. Konflik ini membawa korban jiwa dan arus pengungsi bagi kedua negara (Antaraneews,2011).

1.1.1 Hubungan Indonesia-Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federasi multi etnik dan multi religius yang berada di wilayah jantung Asia Tenggara. Secara ekonomi juga menjadi salah satu negara Asean yang pertumbuhan kembali ekonominya cukup pesat pasca krisis keuangan global tahun 2008 lalu. Malaysia menjadi negara merdeka pada 31 Agustus 1957. Secara geografis wilayah negara tersebut terbagi dua yaitu Malaysia Barat (Semenanjung) dan Malaysia Timur (Sabah, Sarawak) di Pulau Kalimantan. Di sebelah utara, Malaysia berbatasan dengan Thailand dan di sebelah selatan berbatasan dengan Singapura, sedangkan Malaysia Timur berbatasan dengan Brunei dan Indonesia.

Secara umum, sampai dengan saat ini, hubungan antara Indonesia dan Malaysia berjalan dengan baik. Hubungan diplomatik Indonesia–Malaysia secara resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia adalah salah satu dari 14 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Malaysia (kemlu.go.id). Berbagai macam bentuk dan bidang kerjasama bilateral yang dilakukan dengan Indonesia meliputi bidang politik dan keamanan, bidang perdagangan dan investasi serta bidang penerangan, sosial dan budaya.

Di bidang politik dan keamanan, kedua negara menjalin berbagai macam kerjasama dan kesepakatan mengenai berbagai hal yang berkaitan

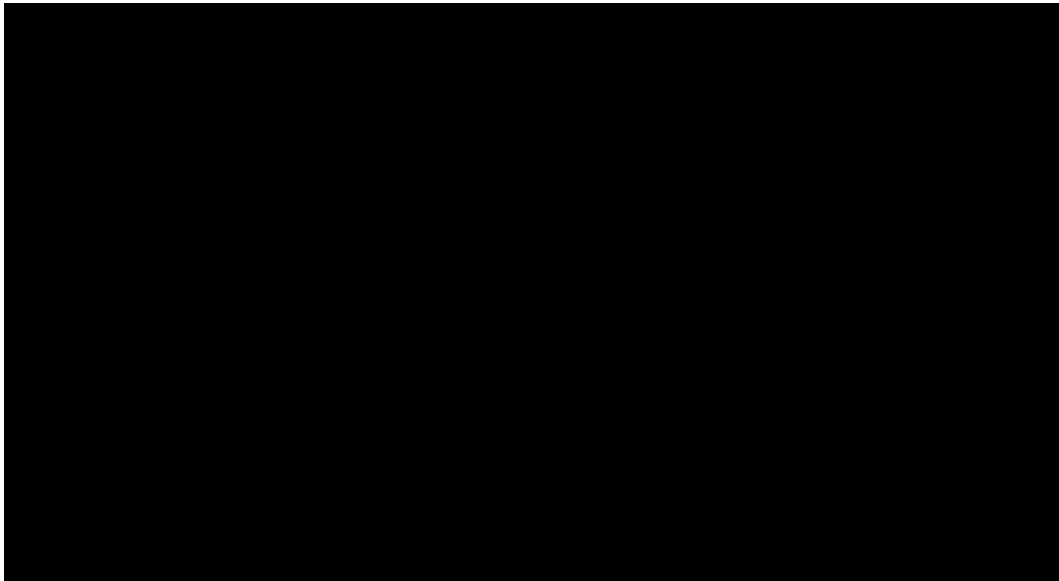
dengan kepentingan bersama seperti masalah perbatasan, kerjasama pertahanan dan masalah TKI. General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) merupakan wadah kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Malaysia di bidang militer-pertahanan. Tujuan dari GBC adalah terciptanya hubungan kedua Angkatan Bersenjata yang mengedepankan profesionalisme tentara namun tetap proporsional dan kritis dalam menanggapi isu-isu diantara kedua negara.

Dari sektor perdagangan, kedua negara merupakan partner dagang yang saling menguntungkan. Menurut data statistik Departemen Perdagangan RI (tabel 1.1), total nilai perdagangan kedua negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indonesia merupakan negara pengekspor terbesar nomor 6 bagi Malaysia setelah China, Jepang, Amerika Serikat, Thailand dan Singapura (Economywatch, 2010). Sedangkan Malaysia merupakan negara pengekspor terbesar nomor 7 bagi Indonesia setelah China, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan dan India (Economywatch, 2010).

Neraca perdagangan Indonesia-Malaysia dalam kurun waktu sejak tahun 2006 menunjukkan surplus. Di sektor migas Indonesia selalu mengalami neraca yang defisit, namun di sektor non-migas, neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami surplus. Dalam dua tahun terakhir secara agregat neraca perdangan Indonesia dengan Malaysia mengalami surplus (Tabel 1.1).

Di bidang penerangan dan sosial budaya, kedua negara membentuk *Eminent Personil Group* (EPG) pada tahun 2008. EPG adalah dewan kepakaran dari kedua negara yang bertugas memberikan rekomendasi strategis mengenai kerjasama di bidang pendidikan, budaya, tenaga kerja, investasi dan pariwisata (kemlu.go.id). Kerjasama di bidang penerangan dan komunikasi antara kedua negara telah berlangsung sejak tahun 1984 melalui Memorandum Kesepakatan Bersama dalam bidang Penerangan dan Komunikasi, yang berisi kerjasama dalam hal jaringan televisi

regional, buletin serumpun, pertukaran wartawan serta *joint photo exhibitions*.



1.1.2 Sejarah Konflik Perbatasan Indonesia-Malaysia

Selain potensi kerjasama yang besar, potensi konflik dengan Malaysia juga sangat besar. Hubungan Indonesia dengan Malaysia beberapa kali mengalami pasang surut karena adanya konflik. Sebagai negara yang bertetangga, hubungan kedua negara dalam sejarahnya diwarnai berbagai macam konflik dan ketegangan.

1.1.1.1 Konfrontasi Malaysia

Pada tahun 1963, terjadi konfrontasi bersenjata antara Indonesia dan Malaysia. Perang ini berawal dari keinginan Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961 yang disertai dengan aksi anti-Indonesia dalam bentuk demonstrasi provokatif terhadap KBRI di Malaysia. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya, yang lebih dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961, untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaya yang tidak sesuai dengan Persetujuan Manila. Oleh karena itu keinginan tersebut ditentang

oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia, yang sekarang dikenal sebagai Malaysia, sebagai "boneka Inggris" yang merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru, serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia (Avrahm,1965:122). Presiden Soekarno memerintahkan penyerbuan ke Sabah dan Serawak melalui Operasi Dwikora pada tanggal 3 Mei 1963 pada suatu rapat raksasa di Jakarta. Indonesia mengerahkan kekuatan sebanyak 25 batalyon dari unsur TNI-AD, AL dan AURI beserta armadanya dan terbagi dalam dua Komando Tempur/Kopur dan satu Komando Siaga (Subritzky,2000). Kopur 1 berkedudukan di Sumatera untuk menyerang sasaran di Semenanjung Malaya. Kopur 2 di Kalimantan Barat dengan sasaran Sabah dan Serawak. Konflik bersenjata ini juga melibatkan Inggris dengan pasukan SAS-nya dan Australia yang mengirimkan 4 resimen pasukannya. Konfrontasi berakhir seiring dengan adanya perkembangan situasi politik dalam negeri Indonesia pada tahun 1965. Secara resmi penandatanganan perjanjian perdamaian yang mengakhiri konflik bersenjata antara Indonesia dan Malaysia dilakukan pada tanggal 11 Agustus 1966.

1.1.1.2 Sengketa Sipadan Ligitan.

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia kembali memburuk pada tahun 2002 ketika kepulauan Sipadan dan Ligitan diklaim oleh Malaysia sebagai wilayah mereka. Klaim ini berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional (MI) di Den Haag, Belanda yang menyatakan bahwa Sipadan dan Ligitan merupakan wilayah Malaysia. Sipadan dan Ligitan adalah pulau kecil di perairan dekat kawasan pantai negara bagian Sabah dan Provinsi Kalimantan Timur. Pulau ini diklaim oleh kedua negara sehingga menimbulkan persengkataan yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Sipadan dan Ligitan menjadi ganjalan kecil dalam hubungan sejak tahun 1969 ketika kedua negara mengajukan klaim atas kedua pulau itu. Kedua negara pada tahun 1997 sepakat untuk

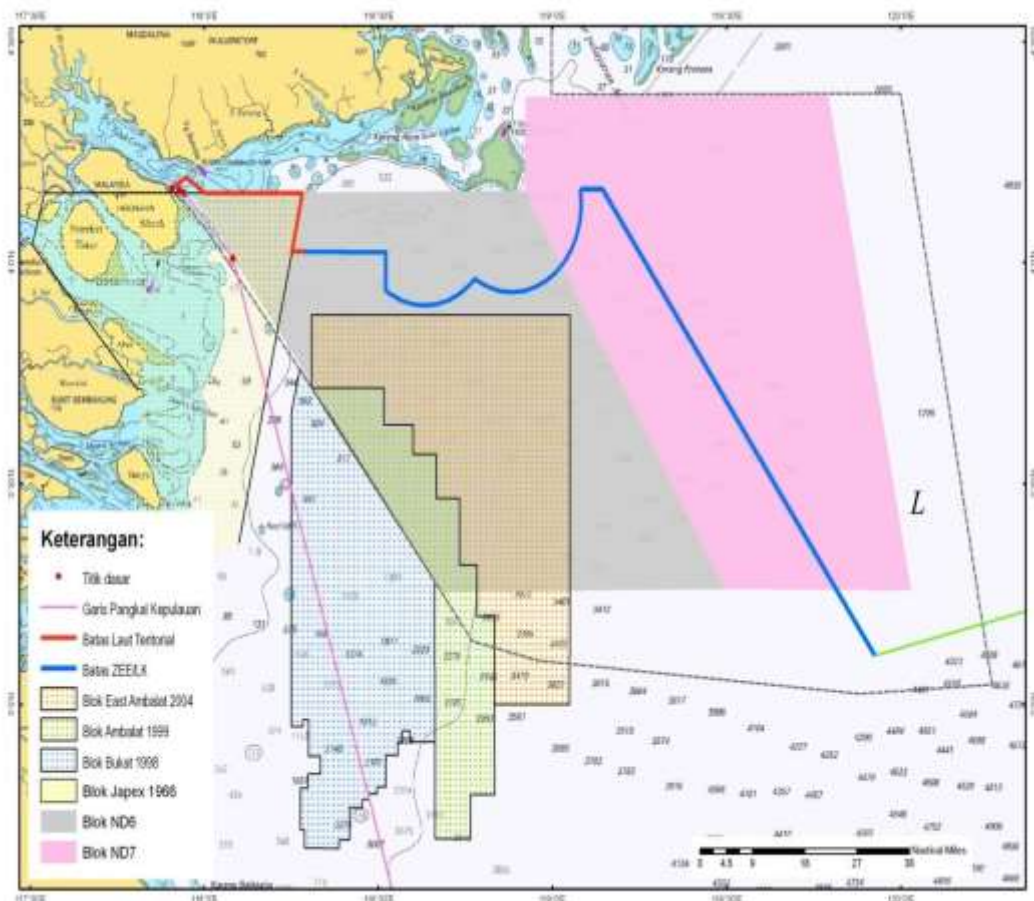
menyelesaikan sengketa wilayah itu di Mahkamah Internasional (MI) setelah gagal melakukan negosiasi bilateral. Kedua belah pihak menandatangani kesepakatan pada Mei 1997 untuk menyerahkan persengketaan itu kepada MI. MI diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa dengan jiwa kemitraan. Hasil putusan sidang MI pada 17 Desember 2002 memberikan hak kepemilikan atas Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia, karena Malaysia dinilai memiliki kontrol efektif yang lebih besar atas Sipadan dan Ligitan, sehingga Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan-Ligitan. Dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Berdasarkan pertimbangan *effectivitee*, yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an. Di pihak yang lain, MI juga menolak argumentasi Indonesia yang bersandar pada konvensi 1891, yang dinilai hanya mengatur perbatasan kedua negara di Kalimantan. Garis paralel 14 derajat Lintang Utara ditafsirkan hanya menjorok ke laut sejauh 3 mil dari titik pantai timur Pulau Sebatik, sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional pada waktu itu yang menetapkan laut wilayah sejauh 3 mil (Dephan.go.id , 2002)

1.1.2. Sengketa Ambalat.

Pada tahun 2005, situasi hubungan Indonesia dengan Malaysia kembali mengalami ketegangan berkaitan dengan klaim Malaysia terhadap blok Ambalat. Terkait dengan kepemilikan atas Sipadan dan Ligitan, Malaysia kembali mengklaim blok Ambalat sebagai wilayah kedaulatan Malaysia. Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan

Timur, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.

Setelah Malaysia sudah menguasai kedua pulau Sipadan dan Ligitan, Malaysia beranggapan bahwa mereka pun dapat menguasai wilayah Ambalat yang kaya akan minyak bumi. Hal ini dimulai dengan pemberian ijin eksplorasi kepada perusahaan minyak Shell, dimana pada area tersebut yaitu wilayah Ambalat Timur (demikian Indonesia menyebutnya) atau blok minyak XYZ (oleh Malaysia), Indonesia telah memiliki ijin eksplorasi dengan ENI (Italia) dan Unocal (AS). Hal ini berakibat pada munculnya dua klaim saling tumpang-tindih antara kedua negara bertetangga (overlapping claim areas) (Gambar 1.1 dan 1.2).



Gambar 1.1 Peta Ambalat
Sumber : Bakorsurtanal



Gambar 1.2 Peta Ambalat

Oleh karena itu pada tahun 2005 Malaysia mengirim kapal perang atau pesawat tempur ke Indonesia karena adanya tindakan provokasi warga Indonesia yang membangun suar di Karang Unarang yang dianggap melanggar batas wilayah laut Malaysia. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena Karang Unarang adalah suatu low tide elevation (elevasi pasang surut), yang dapat dijadikan titik garis pangkal satu negara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berhak mencari titik-titik terluar dari pulau atau karang terluar untuk dipakai sebagai garis pangkal. Itu berarti Karang Unarang yang letaknya di tenggara Pulau Sebatik (bagian Indonesia) berhak dijadikan baselines baru Indonesia, sebagai pengganti garis pangkal di pulau Sipadan dan Ligitan.

Pada dasarnya yang menjadi bahan perdebatan antara Indonesia dan Malaysia adalah terkait dengan bentuk negara yang berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) tahun 1982. Dimana menurut fakta yang ada menyatakan negara Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) yang sudah lama diperjuangkan di forum internasional. Diawali dengan Deklarasi Djuanda tahun 1957 lalu diikuti UU Prp No 4/1960 tentang Perairan Indonesia; Prof Mochtar Kusumaatmadja dengan tim negosiasi Indonesia lainnya menawarkan

konsep "Negara Kepulauan" untuk dapat diterima di Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) III, sehingga dalam "The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982" dicantumkan Bagian IV mengenai negara kepulauan. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena Indonesia merupakan negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain, yang mana ketentuan ini diatur dalam Pasal 46 ayat 1 UNCLOS 1982.

Sesuai dengan pasal 47 dari Unclos 82, memang hanya negara kepulauan yang berhak atas penarikan garis pangkal lurus kepulauan atau menarik garis lurus dari titik terluar pulaunya ke pulau terluar lainnya. Sedangkan pasal 46 menunjukkan tentang definisi negara kepulauan, dan Indonesia memang termasuk negara kepulauan karena terdiri dari pulau-pulau terpisah yang dihubungkan oleh perairan laut. Selain itu, sebuah negara disebut kepulauan jika rasio antara air: darat adalah 1:1 hingga 9:1 (pasal 47 ayat 1), Indonesia adalah negara kepulauan karena rasio air=3,2 juta km persegi, daratan= 1,9 juta km persegi.

Sesuai dengan topografi wilayah dan rasio air, Malaysia memang tidak bisa disebut sebagai negara kepulauan, karena fisiknya yang tidak berbentuk kepulauan dan karena luas daratannya lebih luas dari luas perairannya. Luas daratannya adalah seluas 328.550 km persegi dengan luas laut hanya 1200 km persegi (CIA World Factbook), sehingga tidak bisa disebut sebagai negara kepulauan melainkan merupakan negara kontinental. UNCLOS mengatur bahwa negara pantai yang tidak berbentuk kepulauan tidak dapat menerapkan metode penerapan garis pangkal lurus kepulauan atau menarik garis lurus dari titik pulau terluar ke pulau terluar lainnya seperti yang diatur dalam pasal 47.

Konsepsi negara kepulauan yang diakui dalam UNCLOS itu menyatukan wilayah Indonesia. Di antara pulau-pulau tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (*baselines*-nya) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar (*the outermost points of the outermost islands and drying reefs*). Hal itu diatur dalam

Pasal 47 ayat 1 UNCLOS 1982 yang kemudian diundangkan dengan UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan UU Prp No 4/1960 sebagai implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional Indonesia. Sedangkan Malaysia adalah negara pantai biasa, yang hanya boleh memakai garis pangkal biasa (normal baselines) atau garis pangkal lurus (straight baselines) jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Karena itu, Malaysia seharusnya tidak menyentuh daerah tersebut karena Malaysia hanya bisa menarik baselines Negara Bagian Sabah dari daratan utamanya, bukan dari Pulau Sipadan atau Ligitan, dan hal ini didasarkan pada Pasal 76 UNCLOS 1982.

Aksi-aksi sepihak dan provokatif yang telah dilakukan oleh militer Malaysia di wilayah Ambalat ini antara lain :

- Tgl 21 Februari 2005 di Takat Unarang (nama resmi *Karang Unarang*) sebanyak 17 pekerja Indonesia ditangkap oleh awak kapal perang Malaysia KD Sri Malaka (Wikipedia,2011)
- Malaysia dan Indonesia memberikan hak menambang bagi Shell, Unocal dan ENI (Harvard Asia Quarterly,2005).
- Berkaitan dengan hal tersebut surat kabar KOMPAS mengeluarkan berita bahwa Menteri Pertahanan Malaysia telah memohon maaf untuk perkara tersebut (Antara.co.id, 2007). Berita tersebut segera disanggah oleh Menteri Pertahanan Malaysia yang menyatakan bahwa Malaysia tidak mempunyai sebab untuk memohon maaf karena berada dalam perairan sendiri. Malaysia juga menimbang untuk mengambil tindakan hukum terhadap surat kabar KOMPAS yang dianggap menyiarkan informasi yang tidak benar dengan sengaja.
- Pada koordinat: 4°6'03.59"N 118°37'43"E terjadi ketegangan yang melibatkan kapal perang pihak Malaysia KD Sri Johor, KD Buang dan Kota Baharu berikut dua kapal patroli, sedangkan kapal perang dari pihak Indonesia melibatkan KRI Wiranto, KRI Tongkol, KRI Tedong Naga, KRI KS Tubun, KRI Nuku dan KRI Singa (Gatra,2005). Kemudian terjadi Insiden Penyerempetan Kapal RI dan Malaysia 2005, yaitu peristiwa pada 8 April 2005 KRI Tedong Naga (Indonesia) yang menyerempet

Kapal Diraja (Malaysia) sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak pernah terjadi tembak-menembak karena adanya *Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005* bahwa pada masa damai, unsur TNI AL di wilayah perbatasan RI-Malaysia harus bersikap kedepankan perdamaian dan TNI AL hanya diperbolehkan melepaskan tembakan apabila diawali tembakan dari pihak Malaysia terlebih dahulu (Wikipedia,2011)

- Shamsudin Bardan, Ketua Eksekutif Persekutuan Majikan-majikan Malaysia (MEF) menganjurkan agar warga Malaysia mengurangi pemakaian tenaga kerja berasal dari Indonesia
- Pihak Indonesia mengklaim adanya 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia (Wikipedia,2011)
- Tgl 24 Februari 2007 pukul 10.00 WITA, kapal perang MalaysiaKD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh satu mil laut. Pada sore harinya pukul 15.00 WITA, kapal perang KD Sri Perlis melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh dua mil laut yang setelah itu dibayangkanKRI Welang, kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia.
- Tgl 25 Februari 2007 pukul 09.00 WITA KD Sri Perlis memasuki wilayah RI sejauh 3.000 yard yang akhirnya diusir keluar olehKRI Untung Suropati. Kembali sekitar pukul 11.00, satu pesawat udara patroli maritim Malaysia jenis Beach Craft T Superking melintas memasuki wilayah RI sejauh 3.000 yard, kemudian empat kapal perang yakniKRI Ki Hajar dewantara, KRI Keris, KRI Untung Suropati dan KRI Welang disiagakan (Antara.co.id, 2007).

Unjuk kekuatan Angkatan Laut Malaysia dan pesawat patroli maritimnya direspon oleh Indonesia dengan mengirimkan kekuatan kekuatan armada TNI AL. Gesekan tanpa kontak senjata beberapa kali terjadi antara kekuatan militer Indonesia dan Malaysia di wilayah ini. Permasalahan klaim wilayah ini tidak dilanjutkan ke Mahkamah Internasional. Namun Gubernur Lemhanas, Muladi, pada rapat Dewan

Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional di Kantor Menteri Perekonomian menyampaikan bahwa pendekatan *diplomasi harus dikedepankan tetapi TNI juga harus bersiap untuk perang*.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, kedua negara memiliki sejarah konflik yang cukup kompleks. Potensi konflik di masa datang masih cukup tinggi karena ada beberapa permasalahan yang belum bisa diselesaikan seperti masalah Ambalat, batas wilayah perairan di Selat Malaka dan hal-hal selain masalah klaim perbatasan. Berdasarkan dokumen strategis pertahanan kedua negara, penyelesaian konflik melalui cara damai dan diplomasi akan lebih dikedepankan. Namun penyelesaian dengan jalan kekerasan tetap harus disiapkan apabila diperlukan. Tesis ini akan mencoba menggunakan analisa *game theory* untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan fokus skenario konflik Ambalat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian konflik ambalat dari perspektif *game theory* ?
2. Apakah imbalan atau *payoff* bagi Indonesia dari pilihan-pilihan strategi dalam menghadapi konflik ?
3. Bagaimana pilihan strategi terbaik bagi Indonesia dalam konflik Ambalat dari perspektif *game theory* ?

1.3. Tujuan Penelitian.

- a. Menganalisis dan mengetahui kemungkinan terjadinya konflik dengan Malaysia.
- b. Menganalisis dan mengetahui kemungkinan strategi yang dijalankan dan kemungkinan penyelesaian konflik.

1.4. Manfaat Penelitian.

- a. Secara Akademis : Penelitian ini akan bermanfaat dalam mengukur dan membandingkan kekuatan nasional Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini juga akan bermanfaat dalam mengestimasi kemungkinan strategi yang perlu digunakan dalam memenangkan setiap konflik dengan negara lain.
- b. Secara praktis : Penelitian akan bermanfaat dalam memberikan masukan kepada pembuat kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan baik militer maupun nirmiliter serta pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik melalui perang atau damai.

1.5. Asumsi dan Batasan Penelitian.

- a. Asumsi bahwa kemungkinan konflik yang terjadi merupakan konflik terbatas di satu front atau mandala yaitu daerah Kalimantan Timur khususnya Ambalat, karena :
 - 1) Sejak tahun 2005 sampai saat ini, masih terjadi sengketa yang belum terselesaikan antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat.
 - 2) Kaltim merupakan salah satu *flash point* di “Minimum Essential Force Komponen Utama 2010-2024” sebagai daerah kaya cadangan energi yang rawan campur tangan asing. Wilayah cadangan energi berpotensi dan insentif untuk dikuasai atau diserang oleh musuh (Tabel 1.2). Data dari Departemen ESDM tahun 2009 menunjukkan bahwa satu dari sembilan titik di Ambalat mengandung cadangan potensial hingga 764 juta barrel minyak bumi (terbesar kedua di Indonesia) dan 1,4 TSCF gas. Bahkan, para ahli perminyakan memperkirakan nilai cadangan minyak dan gas yang terkandung di Ambalat mencapai Rp 4.200 triliun. Cadangan Minyak dan Gas di Ambalat menjadi penting mengingat cadangan minyak dan gas Malaysia hanya sebesar 4,1 milyar

barrel dan 85 triliun kaki kubik, dengan produksi harian 650 ribu barrel dan 3,5 milyar triliun kubik.

b. Asumsi bahwa pihak-pihak yang bersengketa akan berperilaku rasional. Bersikap rasional tidak berarti bahwa apa yang dipikirkan oleh para pengambil keputusan adalah pasti yang terbaik atau yang paling tepat. Pihak yang bersikap rasional harus memiliki kemampuan untuk : 1) Menentukan tujuan/obyektif dan sasaran secara jelas, walaupun terlihat janggal bagi pihak lain; 2) Dapat menentukan alternatif strategi yang berbeda dan; 3) dapat memilih strategi yang akan memaksimalkan pencapaian tujuannya (Feix,2007;13). Perilaku yang rasional akan menyebabkan masing-masing pengambil keputusan berusaha untuk memaksimalkan nilai imbalan yang akan diperolehnya, yang diukur dengan menggunakan skala utilitasnya.

Tabel 1.2 : Cadangan Energi dan Ancaman Campur Tangan Asing

No.	Daerah	Ancaman	Minyak Bumi*	Gas Bumi**
1.	NAD (Lhokseumawe)	a. Sengketa perbatasan dengan Thailand, b. Wilayah cadangan energi.	127,2	5,74
2.	Sumatera Utara, Selat Malaka	a. Jalur pelayaran dunia (kepentingan pengamanan oleh asing.) b. Perompakan. c. Wilayah cadangan energi.	111,89	1,28
3.	Riau dan Kepulauan Riau	a. Sengketa perbatasan dengan Singapura. b. Jalur ALKI c. Wilayah kaya energi (49,4 persen).	3.832,11	10,35
4.	Kepulauan Natuna	a. Sengketa dengan China dan Taiwan. b. Wilayah cadangan energi. c. Titik terdekat di <i>hot spot</i> LCS.	383,5	51,46
5.	Kalimantan Timur	a. Sengketa dengan Malaysia. b. Wilayah cadangan energi.	1,28	670

* : MMSTB (Million Stock Tank Barrel)

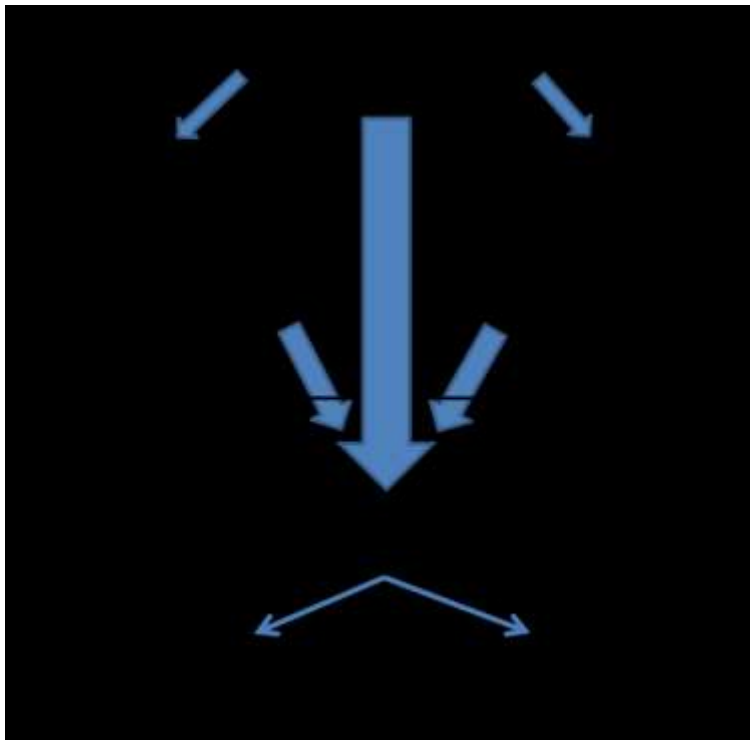
** : TSCF (Trilion Square Cubic Feet)

Sumber: MEF Kemhan RI, Ditjen Migas ESDM

c. Keterbatasan penelitian pada pengukuran dan komparasi variabel *national power* antara Indonesia dan Malaysia tidak dilakukan secara akumulatif namun dengan perbandingan antara masing-masing variabel, dengan batasan waktu dari penggunaan data antara tahun 2005-20011.

1.6. Desain Penelitian

Penelitian ini akan melakukan proses *resources based analysis* dari pihak yang terlibat konflik Ambalat. Analisis dilakukan dengan mengukur dan membandingkan elemen-elemen *national power* dari dua negara. Data mengenai elemen-elemen *national power* diperoleh melalui metode studi literatur, termasuk kajian dokumen-dokumen strategis Kementerian Pertahanan serta dokumen-dokumen Latihan dan Gladi TNI.



Gambar 1.3 Desain Penelitian

Berdasarkan hasil komparasi *national power*, pilihan-pilihan strategi bagi kedua pihak dalam menghadapi konflik dapat ditentukan. Dengan menggunakan analisa *game theory* diharapkan akan dapat menghasilkan pilihan strategi yang terbaik (*dominant strategy*) yang akan menghasilkan

payoff terbaik bagi Indonesia atau mencapai kondisi *payoff* yang merupakan ekuilibrium/keseimbangan.

1.7. Sistematika Penelitian.

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi 5 bab, dengan urutan sebagai berikut :

1. Bab 1 “Pendahuluan” yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab 2 “Tinjauan Pustaka” menjelaskan mengenai mengenai literatur, dasar teori dan keterkaitan penelitian dengan ilmu ekonomi pertahanan, strategi pertahanan Indonesia dan Malaysia serta literatur dasar mengenai *game theory* dan *national power*.
3. Bab 3 “Metodologi Penelitian” yang mendeskripsikan metodologi, dasar berpikir, desain, prosedur penelitian, serta data yang digunakan.
4. Bab 4 “Komparasi *National Power*” berisi analisa komparasi terhadap data-data yang telah dikumpulkan dari masing-masing negara.. Bab ini akan menganalisa perbandingan *National Power* antara dua negara yang terlibat konflik Ambalat,
5. Bab 5 strategi Indonesia-Malaysia dalam konflik ambalat, termasuk *payoff* dari berbagai macam alternatif strategi yang digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.
6. Bab 6 “Kesimpulan” berisi kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan dari hasil penelitian.

Daftar Referensi

I. Buku

- Barston, R.P (1997) *Modern Diplomacy*, Longman, New York
- Bitzinger, R.A (2009) *The Modern Defense Industry : Political, Economic and Technological Issues*, California, Greenwood Publisher.
- Cerami, J. R., & Holcomb Jr., J. F. (2001). *U.S. Army War College Guide to Strategy*. Carlisle, PA: U.S. Army War College Strategic Study Institute.
- Chang (1999) *A Measure of National Power*. Fo-Guang University, Department of Political Science, Taiwan.
- Chin, J (2002) *Malaysia: The Barisan National Supremacy*. In David Newman & John Fuh-sheng Hsieh (eds), *How Asia Votes*, New York: Chatham House, Seven Bridges Press
- Clausewitz, C. V. (1997). *On War*. (J. Graham, Trans.) Hertfordshire: Wordsworth Edition.
- Cline, R. S. (1994). *The Power of Nations in 1990s: A Strategic Assessment*. Lanham: University Press of America.
- Colman, A.M. (1982) *Game Theory and Experimental Games: The Study of Strategic Interaction*, Oxford, Newyork, Pergamon Press.
- Dixit, A. and Nalebuff, B (1991) *Thinking Strategically: The Competitive Edge in Business, Politics, and Everyday Life*, 1st ed. New York: Norton.
- Dixit, A and Sketch, S (2004) *The Games of Strategy*, 2nd edition, WW Norton, London.
- Djelantik, S (2007) *Diplomasi: Antara Teori dan Praktek*. Graha Ilmu, Universitas Pertaahanan Indonesia Yogyakarta.

175

- Funston, J (2001). "Malaysia: Developmental State Challenged". In *Government and Politics in Southeast Asia*.
- Gintis, H (2000), *Game Theory Evolving: A Problem-centered Introduction to Modeling Strategic Behavior*, Princeton University Press, p.133
- Harrell, C. and Bowden, Jr, R.O. (2003) *Simulation Using Promodel*, 2nd ed., McGraw-Hill, Singapore.
- Hartley ,K (2003) "*Defense Economics : Its Contribution and New Developments*", Departement of Politics and Economics,Royal Military College of Cananda.
- _____ (2011), "The Economics of Defense Policy: A New Perspective" , London, Routledge.
- Ismail, Mohd. Razi (2009) *Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science* 32.
- Kelly, A (2003) "*Decision Making Using Game Theory : New Introduction for Managers*", New York, Cambridge University Press.
- Law,AM & Kelton, W.D (1991) *Simulation Modelling and Analysis*, Mc Graw Hill, Singapore.
- Lippmann, W (1955), *Essays in the Public Philosophy*. Little,Brown & Co., Boston.
- Long, Atan & Ali, S. Husin (1984). "Persekolahan untuk Perpaduan atau Perpecahan?", *Ethnicity, Class and Development Malaysia*. Persatuan Sains Sosial Malaysia.
- Mastapeter, C. W. (2008). *The Instruments of National Power: Achieving The Strategic Advantage In A Changing World*. *diss.* Monterey, USA: Naval Postgraduate School.
- Mauna, B (2008) *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* , Bandung : Alumni.

- Maynard Smith, J (1982). *Evolution and The Theory of Games*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of the Great Power Politics*. New York: Norton .
- Mezerik, A (1965). "Malaysia Says Bloody Revolution Not Only Way to Independence". *Malaysia-Indonesia conflict: creation of Malaysia, Indonesia's confrontation policy, Philippine and Indonesian claims, UN involvement, Indonesian withdrawal from UN, roles of UK, US, USSR, and China*. University of Michigan Press, International Review Service.
- McCain, R (2010) "GAME THEORY - A Nontechnical Introduction to the Analysis of Strategy" (Revised Edition), World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- McDonald, J. W. (1991), "Further Exploration of Track Two Diplomacy". In Kriesberg & Thorson (Eds.), *Timing the De-escalation of International Conflicts*. Syracuse: Syracuse Press.
- Morgenthau, H. J. (2006). *Politics Among Nations. 7th*. (K. W. Thompson, & W. D. Clinton, Compilers) New York: McGraw Hill.
- Nye Jr, Joseph (2004) "*Soft Power: The Means to Success in The World Politics*", New York, Public Affairs
- Padelford, N.J., and Lincoln, G.A. (1962) *The Dynamics of International Politics*. New York: Macmillan.
- Papp, D. S. (1984). *Contemporary International Relations: Framework for Understandings*. New York: Macmillan.
- Perwita, A.A.B (2007) *Redefinisi Konsep Keamanan: Pandangan Realisme dan Neo-Realisme dalam Hubungan Internasional Kontemporer* dalam Yulius Puwradi, *Transformasi dalam Studi*

Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Philpott , Daniel (2001), *Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations* , Princeton: Princeton University Press.

Pramandita,Wisnu (2006) *Probability of Killing* dalam Pertempuran Individu Antar Unsur Permukaan dengan pendekatan Simulasi, Surabaya, STTAL.

Sarkesian, S. C. (1989). *U.S. National Security: Policy Makers, Processes, and Politics*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner.

Subritzky, J. (2000) *Confronting Sukarno: British, American, Australian and New Zealand Diplomacy in the Malaysian-Indonesian Confrontation, 1961-1965*, London Palgrave.

Schelling, T.C. (1980) "*The Strategy of Conflict*" , 1980 edition, Cambridge, MA, Harvard University Press.

Spanier, J (1986) *Games Nations Play* , Washington, DC ; Congressional Quarterly Press.

Straffin, Philip D (1994), *Game Theory and Strategy*, New Mathematical Library, Vol. 36, Washington:Mathematical Association of America.

Suryana, A dan Amri, S (2011) *Tata Nilai, Impian dan Cita-Cita Pemuda Muslim Asia Tenggara : Survey di Indonesia dan Malaysia*, Goethe Institut.

Trochim,W and Donnely J (2008) *The Research Method Knowledge Base*, Cengage Learning Cornell University, New York.

Wu, C. (1995). *Guangyi Dazhanlue (Grand Strategy)*. Beijing: Shishi Chubanshe

II. Jurnal, Artikel dan Makalah.

Armitage, R. L. and Nye, Jr, J.S. (2007) *CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America*. Washington, DC: Center for Strategic & International Studies.
http://csis.org/files/media/csis/pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf , retrieved 16 Jan 2012

Asia Military Balance 2011, Jane's Defense Journal.

Democracy index 2011, Democracy under stress, A report from the Economist Intelligence Unit.
http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2011 ,retrieved 21 Jan 2012

Eberstadt, N. (1991). *Population Change and National Security*.
<http://www.foreignaffairs.org/9910601faessay6092/nicholas-eberstadt/population-change-and-national-security.html>, retrieved 6 Feb 2012.

Energy Security and Southeast Asia : The Impact on Maritim Boundary and Territorial dispute. <http://www.asiaquarterly.com/content/view/160>

Feix,M (2007), *Game Theory : Workbook and toolkit for Defense Analysis*, Monterey, Navel Post Graduate.

Geoffrey, T and Chew, E and Ho, J (2008).*Globalisation and Defence in the Asia-Pacific : Arms Across Asia* , Routledge.

Global Military Expenditure 1988-2011, Stockholm International Peace and Research Institute.

Haywood JR,OG (1954) "*Military Decision and Game Theory*", Journal of The Operations Research Society of America, Volume 2/4,November 1954.

Human Development Report 2011 "*Sustainability and Equity*", United Nations Development Programme (UNDP) , New York.

Global Energy Scenarios Dataset - Outlook to 2030 (2010) IHS CERA Energy Strategy

- Published for Institute for Multi-Track Diplomacy. (2004). Principles of Multi-Track Diplomacy. (Retrieved 12 Feb 12 from www.imtd.org)
- John, S (1986) *Games Nations Play*, Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Katoch, R (2006), "*Defense Economic : Core Issues*" Strategic Analysis Vol 30 No. 2 Apr-Jun 2006, London, Institute for defense Studies and Analysis.
- Key, L. E (1996) *Cultivating National Will : An Introduction to National Will*, Maxwell paper no 5, US Air War College, Air War Press, Alabama.
- Laksmana, E. A (2011), Indonesia's Rising Regional and Global Profile : Does Size Really Matter ?; *Contemporary South East Asia*, Vol 33, No 2.
- Maynard Smith, J and Price, G.R (1973). "The logic of animal conflict". *Nature* 246 (5427).
- McLure, J (2004) The Falklands War: Causes and Lessons, *Strategic Insights*, Volume III, Issue 11 (November 2004)
- Saleh A, Razali C & Yusoff (2009) Malaysia's policy towards its 1963 - 2008 territorial disputes, *Journal of Law and Conflict Resolution* Vol. 1(5).
- Sidowski, J. B. (1957). "*Reward and punishment in the minimal social situation*". *Journal of Experimental Psychology*.
- Shubik, M and Varkerke, J H, (1989), "*Open Question in Defense Economic and Economic Warfare*", *Journal of Conflict Resolution*, 33(3) Sept 1989.
- Sulaiman, Y (2011) Transformation of the Offset Management for Malaysia : "Advancing High Technology Agenda for Economic Growth", *Paparan Makalah Seminar JIDD*, 23 Maret 2011.

Treverton, Gregory F & Seth G. J (2005) “ *Measuring National Power*”

RAND_CF215 [w.rand.org/pubs/conf_proceedings/2005RAND_CF215.pdf](http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/2005RAND_CF215.pdf)

Tuch, H.N.(1990), Public diplomacy “Communicating with the World: U.S. Public Diplomacy Overseas”, New York: St. Martin’s Press, 1990, chapter 1, pp.3-11

Ulman,R (1983), Redefining Security, *International Security* 8(1):129-153

UN Secretary General report “Agenda for Peace” 1992, <http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html>

U.S. Air War College. (2007.). “*Military Theory, Theorists, and Strategy*.”

Diakses dari <http://www.au.af.mil/au/awc-thry.htm#atmahan>

Walt, S. M. (1998). *International Relations: One World, Many Theories. Foreign Policy* 110

World Energy Council 2010, Survey of Energy Resources 2010

World Governance Index, Country Data Report for Indonesia 2010 <http://www.govindicators.org>

_____Country Data Report for Malaysia 2010 <http://www.govindicators.org>

III. Dokumen

Area Studi Malaysia 2010-2011.

Buku Putih Pertahanan Indonesia (2008) Departemen Pertahanan Republik Indonesia

Dasar Pertahanan Negara (2010) Malaysia’s Ministry of Defense.

Doktrin Pertahanan Negara (2007) Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

Indonesia Liason Officer's Report 2009-2010.

Laporan Perkembangan Batas Maritim RI dan Malaysia di Perairan Laut Sulawesi/Ambalat (2008), Dinas Hidro-Oceanografi TNI-AL.

Minimum Essential Force,(2010) Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.

Strategi Pertahanan Negara (2007) Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

IV. Modul Perkuliahan

Kuntjorojakti, D (2011) Comparative Economics Systems, Universitas Pertahanan.

Firmanzah (2011) Strategic Management, Universitas Pertahanan.

V. Publikasi Elektronik.

Agriculture Indonesia, data, system , policy and sector, retrieved 6 Jan 2012 <http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Indonesia-AGRICULTURE.html#ixzz1IFuCF1jd>

Axelrod, R. (1984). The Evolution of Cooperation, retrieved 28 Des 2011 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Evolution_of_Cooperation

Bank Negara Malaysia, statement of Assets and Liability , retrieved 14 Jan 2012 <http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=12&pg=142&sdate=2012-01-31>

Brainy Media. (2008). *Definition of War*. Retrieved 14 Des 2011 from Bariny Quote: <http://www.brainyquote.com/words/wa/war238447.html>

Blok Ambalat terindikasi Mengandung Cadangan Minyak Cukup Besar
<http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/2437-blok-ambalat-terindikasi-mengandung-cadangan-minyak-cukup-besar.html>

Cadangan Minyak dan Gas Ambalat Sangat Besar
<http://tempo.co/hg/bisnis/2009/06/02/brk,20090602-179337,id.html>

CIA World Factbook : Malaysia
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html>

Diplomasi dan Kerjasama Bilateral Indonesia 2011
<http://www.kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=Bilateral&I=id> , Retrieved
 27 Jan 2012.

Ernanda,Sus (2005) Penyelesaian Sengketa Ambalat - Diplomasi atau Perang ?
<http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia.ppi-india/2005-03/msg01206.html>

Howden, Daniel (2009). "The Big Question: What is the Commonwealth's role, and is it relevant to global politics?". *The Independent* (London).
<http://www.independent.co.uk/news/world/politics/the-big-question-what-is-the-commonwealths-role-and-is-it-relevant-to-global-politics-1827478.html>

Indonesia and Malaysia Export-Import
http://www.economywatch.com/world_economy/malaysia/export-import.html ,
http://www.economywatch.com/world_economy/indonesia/export-import.html , diakses pada 28 Desember 2010

Indikator Moneter 2011
<http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Indikator+Moneter/>

Indonesia Kehilangan Sipadan-Ligitan

<http://dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=3362>,

Kapal Perang Malaysia Kembali Langgar Wilayah RI di Ambalat
<http://www.antara.co.id/arc/2007/2/27/kapal-perang-malaysia-kembali-langgar-wilayah-ri-di-ambalat/>

Kerjasama Bilateral RI-Malaysia

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=196&P=Bilateral&I=id>

Kamboja Jelaskan Sengketa Perbatasan dengan Thailand

<http://www.antaraneews.com/berita/1304835390/kamboja-jelaskan-sengketa-perbatasan-dengan-thailand>

Kekuatan Barisan Nasional Kian Melemah.

<http://dunia.vivanews.com/news/read/47657->

kekuatan_barisan_nasional_kian_melemahMalaysia Defense Treaties

<http://www.kln.gov.my/web/guest/md-treaties> Retrieved 27 Jan 2012

Konsepsi Strategi Pengembangan Sistem Logistik Wilayah,

<http://balitbang.kemhan.go.id/?q=content/konsepsi-strategi-pengembangan-sistem-logistik-wilayah>

Malaysia Agriculture, Information about Agriculture in Malaysia

<http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/Malaysia-AGRICULTURE.html#ixzz1IFifXid3>

Malaysia Transportation and Infrastructure Data 2011, Retrieved 30 Jan 2012 . <http://www.mot.gov.my/my/Pages/Default.aspx>

Malaysia - Agriculture. Encyclopedia of the nations. Retrieved 2 Feb 2011

from <http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Malaysia-AGRICULTURE.html>

Malaysia Industry Statistic

<http://www.globalsecurity.org/military/world/malaysia/industry.htm>

Najib Ready to end Special Priviledges for Malay

<http://www.themalaysianinsider.com/index.php/malaysia/11093-najib-ready-to-end-special-privileges-for-malays>, diakses pada 2 Jan 2012

Nye Jr., Joseph S. (2006). "In Mideast, the Goal is Smart Power" . Boston Globe.

http://www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2006/08/19/in_mideast_the_goal_is_smart_power/ , Diakses 14 Feb 2012.

Oil Industry sees no Threat ,

<http://finance.yahoo.com/news/Oil-industry-sees-no-threat-reuters-1993557199.html>

Profile Blok Natuna : Cadangan Gas Terbesar di dunia

<http://www.tribunnews.com/2010/11/20/profile-blok-natuna-cadangan-gas-terbesar-di-dunia> , diakses pada 27 Des 2011

Shor, Mikhael (2005) "Payoffs" Dictionary of Game Theory Terms, Game Theory .net, <[http://www.gametheory.net/dictionary/ Payoffs.html](http://www.gametheory.net/dictionary/Payoffs.html)> diakses pada 2 Jan 2011.

Sengketa Ambalat, TNI Diminta Siap Perang

<http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/05/28/brk,20090528-178561,id.html>

Visualisasi Batas Ambalat

<http://www.borderstudies.info/wp-content/uploads/2012/01/ambalat.swf>